

Permasalahan makanan bergizi gratis program prabowo-gibran

Iffan Maulana A.S

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110250@maoelanaasiffan@gmail.com

Kata Kunci:

Permasalahan, Makanan Bergizi Gratis, Program Prabowo-Gibran, sumber daya manusia, peningkatan, estandar nutrisi

Keywords:

Problems, Free Nutritious Food, Prabowo-Gibran, human resources, improvement, nutritional standards

ABSTRAK

Artikel ini dimaksudkan untuk menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan bagian integral dari visi dan misi utama Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini bersifat kualitatif, dengan sumber data berasal dari kajian pustaka melalui metode deskriptif-analitik. Program Makan Gratis ini memiliki tujuan yang luhur, termasuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna mewujudkan generasi emas pada tahun 2045. Walaupun dihadapkan pada berbagai rintangan, program ini dapat dijalankan secara efektif dan tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar memerlukan. Tentu saja,

perdebatan mengenai hal ini belum mencapai kesimpulan, terutama karena isu Makan Siang Gratis lebih berkaitan dengan standar nutrisi yang memadai, bukan sekadar penyediaan makanan mewah secara cuma-cuma.

ABSTRACT

This article aims to outline the challenges faced by the Free Nutritious Meals (MBG) program, an integral part of the primary vision and mission of President and Vice President Prabowo-Gibran. The approach used in this article is qualitative, with data sources derived from a literature review using descriptive-analytical methods. The Free Meals program has lofty goals, including improving the quality of Human Resources (HR) to realize a golden generation by 2045. Despite facing various obstacles, the program has been implemented effectively and targeted to groups truly in need. Of course, the debate on this matter has not yet reached a conclusion, especially since the Free Lunch issue is more related to adequate nutritional standards, rather than simply providing luxurious food for free.

Pendahuluan

Mutu sumber daya manusia (SDM) adalah elemen krusial dalam mewujudkan aspirasi pembangunan berkelanjutan suatu negara. SDM yang berkualitas tidak hanya ditunjang oleh keunggulan akademis semata, namun juga memerlukan keadaan fisik dan psikologis yang prima guna mendukung optimalisasi proses pembelajaran dan peningkatan produktivitas di kemudian hari (Putri et al., 2025, dalam Ucu Agustini et al., 2025: 363). Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2025), program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif penting yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yaitu Indonesia Emas 2045. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari upaya penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang merupakan salah satu dari delapan prioritas Asta Cita. Pelaksanaan MBG berfokus pada penanggulangan masalah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kekurangan gizi dan stunting di Indonesia, serta ditujukan untuk mendukung perkembangan anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, dan peningkatan mutu sektor pendidikan nasional. Sasaran utama dari Program MBG adalah menurunkan prevalensi malnutrisi dan *stunting* yang masih merupakan tantangan signifikan di Indonesia, terutama di sektor populasi yang rentan. Kelompok yang dimaksud mencakup anak balita, anak-anak, wanita dalam masa kehamilan, dan wanita yang sedang menyusui. Program ini dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan nutrisi harian masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu, agar sesuai dengan rekomendasi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Lalu, bertambahnya tahun pastinya ada peningkatan dan permasalahan saat menjalani program Makan Bergizi Gratis tersebut.

Pembahasan

Makanan Bergizi Gratis

Mutu pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh silabus dan cara mengajar, melainkan juga dipengaruhi oleh elemen-elemen dari luar yang berdampak pada pertumbuhan kemampuan berpikir dan fisik peserta didik. Salah satu kontributor penting bagi pencapaian pendidikan adalah asupan nutrisi yang memadai bagi anak usia sekolah, yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas intelektual, energi fisik, dan daya tahan dalam proses belajar (UNESCO, 2021 dalam Rif'iy Qomarrullah at al, 2025: 130). Konsumsi nutrisi yang cukup mendukung konsentrasi siswa selama kegiatan belajar mengajar, yang berkontribusi pada penyerapan materi yang lebih efisien. Lebih lanjut, status gizi yang baik memfasilitasi pertumbuhan fisik yang memadai, yang secara tidak langsung menunjang kemampuan motorik dan partisipasi sosial di lingkungan sekolah. Akan tetapi, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kesulitan dalam memperoleh pangan bernutrisi masih merupakan hambatan signifikan yang secara langsung mempengaruhi mutu pendidikan.

Menurut Grantham-McGregor et al. (2007 dalam Rif'iy Qomarrullah at al, 2025: 130), sejumlah studi telah mengindikasikan bahwa anak-anak dengan nutrisi yang memadai menunjukkan peningkatan fokus, pencapaian akademis yang superior, dan kehadiran yang lebih konsisten di lingkungan pendidikan. Sebaliknya, defisiensi nutrisi dapat mengakibatkan komplikasi kognitif yang berkepanjangan, termasuk keterlambatan dalam perkembangan mental dan penurunan kemampuan berpikir kritis. Untuk menjawab permasalahan ini, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai sebuah pendekatan instruktif, yang dirancang untuk mendukung inklusivitas dan keberlanjutan yang lebih luas. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi prevalensi malnutrisi, tetapi juga untuk menjamin bahwa seluruh peserta didik, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu, memperoleh peluang setara untuk mengembangkan potensi akademis dan sosial mereka. Melalui penerapan yang cermat, program MBG memiliki kapasitas untuk mengerek standar mutu pendidikan secara komprehensif, menurunkan tingkat absensi siswa, serta memfasilitasi partisipasi publik dalam penyediaan pangan bernutrisi bagi para siswa.

Permasalahan Keracunan Makanan Bergizi Gratis

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah melalui beragam inisiatif guna memperbaiki status gizi masyarakat, yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing. Salah satu inisiatif kunci yang digalakkan adalah program Makanan Bergizi (MBG), yang dirancang untuk mendistribusikan pangan dengan profil nutrisi yang seimbang kepada populasi, dengan fokus khusus pada kelompok rentan seperti anak balita, ibu hamil, dan lansia. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi malnutrisi dan peningkatan status kesehatan masyarakat secara luas. Namun, dalam pelaksanaan program MBG, terdapat berbagai permasalahan signifikan yang tidak dapat diabaikan, salah satunya adalah insiden keracunan makanan. Keracunan tersebut umumnya disebabkan oleh faktor-faktor seperti sanitasi yang tidak memadai, kontaminasi bahan makanan, proses pengolahan yang tidak memenuhi standar kebersihan, serta penyimpanan makanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kasus keracunan makanan ini dapat memberikan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, mulai dari gangguan pencernaan hingga kematian dalam kondisi yang paling parah.

Isu keracunan dalam program MBG mengindikasikan adanya perbedaan antara sasaran program dan pelaksanaan aktual di lapangan. Faktor-faktor kontributor utama mencakup defisiensi edukasi bagi personel pelaksana program mengenai kebersihan dan keselamatan pangan, pengawasan yang tidak memadai terhadap mutu bahan mentah makanan, serta kelangkaan infrastruktur pendukung semisal area penyimpanan yang sesuai dan instrumen pengolahan yang steril. Dari perspektif peraturan, meskipun pemerintah telah menetapkan standar keselamatan pangan, pengaplikasian dan pemantauan di tingkat lokal masih menghadapi hambatan signifikan. Ini disebabkan oleh kekurangan tenaga profesional yang terampil dan minimnya fasilitas pengujian keamanan pangan di berbagai wilayah. Untuk menanggulangi isu ini, dibutuhkan suatu metode yang menyeluruh dan terstruktur. Tahap awal adalah meningkatkan kapabilitas personel melalui pelatihan mendalam mengenai standar keselamatan makanan dan etika kebersihan yang sesuai. Selanjutnya, pengawasan dan penilaian rutin di lapangan perlu dikuatkan demi memastikan mutu pangan yang didistribusikan menepati kriteria yang telah ditentukan. Tahap ketiga melibatkan perbaikan fasilitas dan infrastruktur untuk pengolahan makanan yang memenuhi aspek kebersihan dan keamanan. Sebagai penutup, perlu dilakukan sosialisasi kepada para penerima manfaat agar mereka menjadi lebih selektif dan memperhatikan mutu sajian yang mereka terima.

Sebagai kesimpulan, program MBG merepresentasikan sebuah inisiatif strategis dari pemerintah guna memajukan taraf gizi masyarakat. Namun demikian, efektivitas program ini sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan yang akurat dan terjamin keamanannya. Isu keracunan makanan yang timbul patut menjadi fokus utama dan memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh guna memastikan pencapaian tujuan program secara optimal serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan publik (Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI, 2025).

Program ini Dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah masih menerima beragam tanggapan dari publik. Program ini, yang awalnya membutuhkan alokasi dana sebesar 71 triliun rupiah, dikhawatirkan dapat mengakibatkan pengurangan anggaran dari sektor-sektor lain. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak karena diprediksi akan terjadi pembengkakan biaya yang berkelanjutan, serta berpotensi memengaruhi sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan akibat pemotongan anggaran tersebut. Ekonom sekaligus Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D., berpendapat bahwa program MBG menghadapi kendala signifikan, khususnya terkait aspek distribusi dan pengadaan suplai makanan. Beliau mengutarakan bahwa program berskala nasional ini berisiko mengalami inefisiensi penggunaan dana karena cakupannya bersifat menyeluruh, di mana anak-anak dari keluarga yang berkecukupan juga berhak menerima manfaatnya, padahal mereka tidak berada dalam kategori yang membutuhkan.

Wisnu berpendapat bahwa kesuksesan program ini memerlukan pembelajaran dari negara-negara lain yang telah mengimplementasikan inisiatif serupa. Sebagai contoh, ia mengemukakan program pemberian makanan gratis untuk siswa yang diterapkan di Amerika Serikat. Di AS, pemberian makanan gratis ini diintegrasikan sebagai komponen kebijakan nasional dengan kerangka kerja *Farm to Table*. Pendanaan untuk program ini bersumber dari *Sustainable Agriculture Research and Education (SARE)* dan melibatkan partisipasi dari para petani, peternak, akademisi, serta berbagai komunitas di Amerika Serikat. Inisiatif lain yang dilaksanakan oleh AS adalah *National School Lunch Program (NSLP)*, yang bertujuan untuk memberikan santapan bergizi kepada jutaan anak di Amerika Serikat, khususnya mereka yang berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah. NSLP memberlakukan standar nutrisi yang mengacu pada *Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA)* tahun 2010. Standar ini mencakup pemanfaatan produk pangan lokal dan penyesuaian menu agar selaras dengan Rekomendasi Pangan Amerika Serikat.

Wisnu menekankan bahwa keberhasilan program semacam ini memerlukan manajemen yang cermat untuk menghindari kerugian bagi petani kecil dan pelaku usaha lokal. Ia berpendapat bahwa jika program tersebut terlalu terpusat, keuntungan hanya akan dinikmati oleh vendor besar, sementara petani kecil dan UMKM lokal akan terpinggirkan. Untuk meningkatkan efektivitas, ia menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan wilayah dan sekolah dengan tingkat kerawanan pangan *food insecurity* tertinggi. Mengingat keterbatasan anggaran, program ini sebaiknya diutamakan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Ia meyakini bahwa program ini berpotensi memberikan dampak positif yang berarti asalkan pelaksanaannya tepat sasaran, terutama dalam fokusnya pada kelompok rentan. Selain itu, untuk menjamin efektivitas pengelolaan anggaran, diperlukan keterlibatan audit independen serta partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, transparansi dan

akuntabilitas menjadi elemen krusial dalam pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan program ini.

Menurut Wisnu, sebagai upaya efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah, sebaiknya diterapkan skala prioritas yang lebih tepat. Alternatif pendanaan dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi belanja pemerintah, dengan pemangkasan anggaran yang dilakukan secara prudent agar tidak merugikan sektor-sektor krusial. Jika efisiensi tetap diperlukan, pemangkasan dapat difokuskan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, penerapan pajak progresif bagi kelompok berpenghasilan tinggi, serta proyek infrastruktur yang tidak mendesak (Universitas Gadjah Mada, 2024).

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program MBG, Keselamatan Jadi Prioritas

Menurut **Kementerian Kesehatan RI (2024)**, pemerintah secara aktif menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara komprehensif. Mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga untuk merumuskan langkah-langkah konkret guna meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan program MBG. “Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan pada konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengadopsi serangkaian langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah guna melakukan evaluasi dan investigasi secara komprehensif. Kedua, melaksanakan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tanpa terbatas pada lokasi yang terdampak. Ketiga, meningkatkan proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini berada di bawah pengawasan nasional. Keempat, memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian terkait, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya yang berperan dalam program MBG diwajibkan berkontribusi aktif dalam upaya perbaikan. Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai prasyarat mutlak, bukan lagi sekadar formalitas administratif. “SLHS sebelumnya bersifat administratif semata, namun kini menjadi kewajiban. Tanpa itu, potensi kejadian serupa berisiko terulang. Kami tidak menginginkan hal tersebut terjadi kembali,” tegas Menko Pangan Zulkifli Hasan. Keenam, pemerintah menginstruksikan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan program MBG di tingkat daerah.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa seluruh langkah-langkah tersebut diambil secara terbuka dan akuntabel guna membangun keyakinan masyarakat bahwa makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan urgensi percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi

(SLHS) bagi seluruh dapur MBG untuk menjamin standar kebersihan, kualitas sumber daya manusia, serta proses pengolahan makanan yang aman dan layak konsumsi. Lebih lanjut, Menkes menyatakan bahwa proses percepatan ini wajib diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan.

Kesimpulan dan Saran

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sumber daya manusia. Meskipun demikian, implementasinya dihadapkan pada dua hambatan utama: bahaya keracunan makanan yang disebabkan oleh kondisi sanitasi dan pengawasan yang kurang memadai di lokasi pelaksanaan, serta kemungkinan pemborosan dana akibat jangkauan program yang terlalu luas. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk segera memperbaiki mekanisme pengelolaan, memastikan keamanan bahan pangan, dan memfokuskan distribusi manfaat secara eksklusif kepada keluarga yang paling membutuhkan. Sehubungan dengan artikel ini, dianjurkan agar masyarakat Indonesia berkolaborasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan sikap kritis namun tetap patuh pada peraturan, sistem demokrasi berperan sebagai sarana kebebasan bagi rakyat untuk mengekspresikan pendapat, asalkan ekspresi tersebut tidak berupa kebencian, melainkan semangat cinta tanah air. Berupaya mencapai yang terbaik dari berbagai aspek untuk bangsa ini, melalui kritik konstruktif, demonstrasi, dan berbagai pendekatan positif lainnya, merupakan langkah untuk memperkuat, mengokohkan, dan memberikan arah yang jelas bagi masa depan Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran: Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru?. NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1(3), 215-226. (n.d.).
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menyongsong Indonesia Emas 2045*. SiMantap.MBG. <https://sync-disdik.jabarprov.go.id/mbg/index.php>
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program MBG, Keselamatan Anak Jadi Prioritas*. Kementerian Kesehatan RI. Diakses dari <https://kemkes.go.id/id/pemerintah-perkuat-tata-kelola-program-mbg-keselamatan-anak-jadi-prioritas>
- Maharani, P. A., Namira, A. R., & Chairunnisa, T. V. (2024). Peran makan siang gratis dalam janji kampanye prabowo gibran dan realisasinya. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 1-10.
- Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. (2025, 30 September). *MBG dan Permasalahannya* (SIPINTER No. 187). Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Diakses dari <https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/187>
- Rif'iy Qomarrullah, Suratni, Lestari Wulandari S, Muhammad Sawir. (2025). DAMPAK JANGKA PANJANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP KESEHATAN

DAN KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN. *INDONESIAN JOURNAL OF INTELLEKTUAL PUBLICATION* 5 No.5: 130-137.

Ucu Agustini, Sri Mulyani. (2025). EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN KEBIJAKAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI INTERVENSI PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Kiprah Pendidikan* 4 No.3: 362-368.

Universitas Gadjah Mada. (2024). *Program MBG Dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu*. Universitas Gadjah Mada. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/program-mbg-dinilai-berisiko-pemborosan-sebaiknya-diprioritaskan-pada-anak-keluarga-kurang-mampu/>